

BAB III

KEPEMIMPINAN ERDOGAN DAN AKP SERTA TRANSFORMASI KEBIJAKAN ERDOGAN MENJADI OTORITER

BAB III merupakan bab yang berisi penjelasan Republik Turki di bawah kepemimpinan Erdogan dan AKP serta transformasi kebijakan Erdogan menjadi otoriter. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan ulasan tentang Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) dari sejarah berdirinya partai, identitas dan kepentingannya, serta AKP sebagai pemenang pemilu. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan Turki dibawah kepemimpinan AKP dan Erdogan. Setelah mengetahui bagaimana Turki dibawah kepemimpinan AKP dan Erdogan, maka pembahasan akan menuju pada Erdogan sebagai presiden yakni kemenangan Erdogan dalam pemilu dan transformasi kebijakan Erdogan menjadi otoriter.

A. AKP (Adelet Ve Kalkinma Partisi)

1. Sejarah Terbentuknya AKP

AKP (Adelet Ve Kalkinma Partisi) atau dalam bahasa Indonesia Partai Keadilan dan pembangunan didirikan pada 14 Agustus 2001. Partai ini didirikan oleh Erdogan dan Abdullah Gul beserta rekan-rekannya kelompok muda pembaharu bekas anggota Partai Refah yang dipimpin Erbakan. Saat Erdogan dan Gul keluar dari penjara, Partai Refah yang dilarang oleh militer telah menjelma menjadi Partai Fadhilah yang dipimpin oleh Rajai Kutan, namun pada 8 Mei 1999 Mahkamah Konstitusi membubarkan partai Fadhilah dan anggota partai ini terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tetap mempertahankan Partai Sa'adah, sementara kelompok pemuda pembaharu seperti Erdogan dan Gul, mendirikan Partai AKP .

Gerakan Islamis di Turki termasuk AKP, tidak dapat dipisahkan dari sosok Profesor Necmetin Erbakan. Ia adalah insinyur, akademisi, dan islamis yang berjuang mempertahankan identitas dan spiritualitas Islam di tengah sekulerisme. Pemikirannya tertuang dalam *Milli Gorus* (Pandangan Nasional) yang menjadi visi gerakan islamis. Menurutnya, Visi Nasional Turki harus berpijak pada penguatan prinsip moral dan spiritualitas Islam (islamisme), industrialisasi, dan kerja sama dengan dunia Islam (Pan Islamisme). Erdogan bertemu dengan Erbakan pertama kali saat masih kuliah. Pertemuan inilah yang kemudian membuka cakrawala pemikiran Erdogan tentang politik.

Ide pembentukan partai ini justru muncul saat Erdogan dipenjara. Saat itu Erdogan yang bertemu dengan Abdullah Gul di penjara, mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi pergerakan politik mereka kedepannya. Di dalam penjara mereka memikirkan ide-ide baru untuk perubahan di Turki, mereka dapat memahami kesalahan yang dilakukan guru mereka, Erbakan sebagai ketua Partai Refah. Erbakan terlihat frontal dan tegas untuk menyuarakan perjuangan nilai-nilai Islam dan cenderung menolak berkompromi dengan kelompok sekular sehingga Erbakan dikudeta oleh militer dan Partai Refah dinonaktifkan. Maka ide baru yang mereka dapat adalah tidak berseteru dengan negara dan tidak mengusik atau mengganggu ideologi sekulerisme Attaturk dengan seruan Islam. AKP disebut Erdogan sebagai partai moderat dan social konservatif. Maka bisa disebut bahwa AKP adalah partai yang paling moderat dalam sejarah partai-partai yang mengusung Islam di Turki dalam empat dekade terakhir.¹

Penamaan AKP sendiri dalam bahasa Turki berarti ‘putih’ dan ‘bersih’, yang merefleksikan komitmen sebagai partai politik yang bersih dari masa lalu yang korup. Simbol

¹ Syarif Taghian, Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta ,2012, hal 50

AKP adalah lampu bohlam bersinar yang melambangkan kontinuitas sinar. Erdogan diangkat sebagai pemimpin partai baru ini dengan harapan yakni citra dan reputasinya sebagai walikota Istanbul akan menjadi simbol dan daya tarik politik. Berbeda dengan partai islamis sebelumnya yang mengandalkan model kepemimpinan kharismatik, AKP memperkenalkan demokrasi di internal partai, pemilihan langsung kandidat wakil partai dalam parlemen, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan membuka perdebatan dalam formulasi kebijakan partai.

2. Identitas dan Kepentingan AKP

Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) adalah partai yang lahir dari ide kreatif dalam menghadapi tekanan sekulerisme yang ditopang kekuatan militer. AKP memiliki identitas yang unik karena sebagai partai yang moderat social demokrat namun tetap menjadikan Islam sesuatu pijakan untuk memberikan manfaat pada masyarakat. Menurut Erdogan dan Gul, Islam adalah agama yang mengatur tatanan kehidupan yang lengkap dan sangat baik. AKP mendukung sekulerisme , kebijakan ekonomi pasar, dan masuknya Turki dalam Uni Eropa. Namun demikian, dalam visi AKP disebutkan bahwa agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam tatanan sosial masyarakat.

Identitas yang melekat pada AKP sangat unik dan berbeda dibandingkan partai-partai yang pro Islam sebelumnya. Sejak berdirinya AKP, partai ini sangat jauh dari penjualan agama. AKP juga menerima sekulerisme sebagai landasan demokrasi dan kebebasan. AKP memberikan pandangan baru kepada sekulerisme bahwa partai bukan sebagai pengatur negara yang berdasarkan agama, namun AKP adalah partai yang menggerakkan demokrasi dan menjunjung tinggi kepentingan nasional Republik Turki. Identitas AKP jika dilihat dari politik luar negerinya memiliki orientasi ganda. Tujuan utamanya yakni memperoleh

keanggotaan dalam Uni Eropa dan juga membangun hubungan bilateral dengan negara-negara Islam. Sehingga dalam hal ini AKP bisa diterima oleh kelompok sekuler yang menginginkan Turki bergabung Uni Eropa, begitu juga dengan kelompok Islam yang peduli terhadap isu-isu dunia Islam seperti persoalan Palestina, Suriah dan yang lainnya.

Identitas yang bisa terlihat dari AKP adalah prinsip yang memadukan Nasionalisme, Sekularisme, dan Islam. Secara singkat bisa dikatakan bahwa AKP adalah patai yang moderat dan menyerukan perdamaian serta kebebasan dalam keyakinan. Hal ini bisa dilihat dari tokohnya yang meyakini bahwa Islam sebagai landasan dalam beramal dan memberikan manfaat bagi seluruh alam. AKP dapat membuktikan bahwa Turki bisa lebih baik dengan cara dan ide kreatif yang dimunculkan oleh AKP.

Jika dilihat dari perspektif historis, kehadiran pemikiran demokrasi liberal AKP tidak lahir begitu saja. Pemikiran tersebut hadir melalui proses yakni adanya refleksi dinamika internal partai dan transformasi pemikiran kalangan islamis yang berlangsung terus menerus dalam merespon kondisi sosial politik yang tengah berkembang. Dalam konteks ini, mengutip Greg Fealy dalam *joining the Caravan, Islamism, Middle East and Indonesia*, gerakan Islam mau tidak mau harus melakukan proses seleksi, adaptasi, dan pribumisasi gagasan islamisme dalam konteks lokalitas. Transformasi politik kalangan islamis reformis ini lebih tepat disebut Pos-Islamisme.²

AKP dipimpin oleh tokoh-tokoh yang meyakini bahwa Islam adalah salah satu solusi untuk persoalan negara Turki. Dalam artian AKP melihat perubahan dan arah kebijakan

² Ahmad Dzakirin, *Kebangkitan Pos-Islamisme, Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki memenangkan Pemilu*, PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, Solo, 2012, hal 330

Turki dengan sudut pandang Islam. Namun dalam hal ini AKP cukup unik dalam menggunakan Islam sebagai solusi. Cara AKP dalam menerapkan Islam berbeda dengan kelompok Islam umumnya dan partai-partai Islam sebelumnya. AKP mengikuti perkembangan zaman, maka perjuangan Islam bukanlah simbolnya yang diterapkan atau dikampanyekan, namun nilai-nilainya atau lebih kepada Islam yang substansial. Sesuatu yang rusak di negara Turki akan diganti oleh AKP dengan tatanan yang baru, namun tanpa menghilangkan atau mengganti tatanan yang sudah baik, sehingga dengan cara ini AKP bisa diterima semua masyarakat Turki dan bukan kelompok Islam saja.

AKP juga memiliki kepentingan jangka panjang atau cita-cita untuk Turki tahun 2023 yakni dalam hal politik, Turki dapat menegakkan demokrasi dengan baik dan menjadi identitas politik Turki. Selain itu Turki lepas dari campur tangan militer dan sipil memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dalam politik luar negeri, AKP ingin menjadikan Turki sebagai anggota Uni Eropa. AKP menargetkan bahwa pada tahun 2023, Turki memiliki pendapatan perkapita menjadi 25.000 dolar AS, serta masuk dalam 10 besar negara terkuat dunia. AKP juga membuat rencana penguatan industri domestik serta neraca impor dan export untuk kesejahteraan rakyat Turki dan hal-hal lainnya yang menjadi cita-cita AKP untuk membangun Turki lebih maju.

3. AKP Memenangkan pemilu

Satu tahun semenjak AKP didirikan yakni pada tahun 2001, AKP sebagai partai baru langsung menjadi partai pemenang dalam pemilu tahun 2002. Dalam pemilu ini AKP mendapatkan suara paling banyak dan mendapat kursi yang dominan dalam Majelis Nasional Agung atau parlemen Turki. Partai ini berhasil menghantarkan 323 wakil-wakilnya di

parlemen.³Pada saat itu ketua AKP yakni Erdogan belum diperbolehkan untuk naik menjabat sebagai Perdana Menteri dan juga diawasi gerak politiknya sebagai konsekuensi hukum yang telah menyebabkan ia dipenjara, maka ketika itu yang naik untuk menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Abdulla Gul.Abdullah Gul menjabat sejak 16 November 2002 hingga 14 Maret 2003. Saat larangan beraktifitas politik rdogan dicabut, Erdogan kemudian menerima jabatan pemimpin pemerintahan Turki sebagai Perdana Menteri.

Kesuksesan AKP dalam pemilu ini merupakan sejarah baru bagi parlemen Turki, karena sebelumnya belum pernah ada satu partai pun yang berhasil mendominasi kursi parlemen sejak 1987. Erdogan dengan partai baru ini hadir ketika masyarakat Turki berada dalam kondisi putus asa dan keterpurukan politik. Terutama setelah skandal yang terjadi pada tahun 2001, dimana Dewan Keamanan Turki menampakkan pemimpin pemerintahan ketika itu melemparkan buku perundang-undangan ke udara yang menyebabkan lenyapnya kepercayaan masyarakat dan seluruh partai politik. Erdogan mencoba mengembalikan kepercayaan rakyat Turki terhadap negara dan instansi-instansinya. Harapan baru ini muncul setelah rakyat Turki putus asa terhadap praktek demokrasi yang selalu terhenti ketika kelompok Islam memasuki kancah politik.⁴

Pada saat pemilu tahun 2007, suara terbanyak kembali dimenangkan oleh AKP, maka Erdogan kembali memimpin Turki sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan pemilu tahun 2011, AKP tetap menjadi partai yang dominan walau suara yang diperoleh sedikit berkurang. Dalam pemilu ini AKP memperoleh *popular vote* , 50 persen dan menyabet 327 kursi. AKP tetap menadapat keprcayaan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketersediaan lapangan

³ Syarif Taghian, Op.cit Hal.34

⁴ Syarif Taghian, Op.cit Hal.35

pekerjaan, dan akses ekonomi yang semakin mudah. Kemenangan AKP ini juga dianggap sebagai dukungan dan pemberian mandat penuh rakyat Turki atas program reformasi AKP.⁵ Kemenangan AKP sendiri sudah diprediksi banyak pihak terutama setelah pemerintah Erdogan memenangkan referendum untuk amandemen konstitusi Turki pada 2010. Proposal reformasi itu antara lain pemilihan presiden secara langsung, pengurangan masa jabatan presiden dari 7 tahun ke 5 tahun, dan presiden dapat dipilih kedua kalinya.

Dalam pemilihan umum presiden tanggal 10 Agustus 2014, lagi-lagi Erdogan melalui AKP berhasil menang terpilih sebagai Presiden Turki dengan masa jabatan selama lima tahun. Ini adalah pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting dalam dinamika demokrasi Politik Turki mengingat dalam 91 tahun sejarah negara tersebut, presiden selalu dipilih oleh parlemen. Jika dihitung sejak awal mula AKP menguasai pemerintahan yakni tahun 2002 sampai saat tulisan ini dibuat (2018), maka AKP telah menguasai Turki selama 16 tahun. Kemenangan telak AKP dalam lima kali pemilu secara berturut-turut ini karena strategi Erdoğan memutar haluan partai, dari semula berwajah partai Islamis dirubah menjadi partai yang lebih terbuka dan akomodatif: menerima liberalisme, sekulerisme, demokrasi dan pluralisme.

B. Turki Dibawah Kepemimpinan Erdogan dan AKP (2001-2014)

Sejak AKP sebagai pemegang kekuasaan, Turki mengalami banyak perubahan dan keberhasilan, namun untuk mencapai keberhasilan itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan dan singkat. Apalagi, sebelum AKP berkuasa Turki dikenal sebagai ‘negara sakit’ di Eropa. Ada tiga penyakit kronis yang ada pada Turki ketika itu. *Pertama,*

⁵ Ahmad Dzakirin, Op.cit Hal.46

dominasi militer di segala kehidupan masyarakat. *Kedua*, korupsi yang merajalela. *Ketiga*, perang terbuka dengan suku Kurdi. Bisa dikatakan bahwa Perdana Menteri Erdogan dan pemerintahan dari partai AKP banyak mengubah arah kebijakan politik sekuler ke Islam. Namun sebagai partai yang memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Turki, bukan hanya Islam saja yang menjadi prioritas AKP, karena AKP membuktikan diri sebagai Turki era ketiga. Turki era ketiga adalah berbeda dengan Ottoman dan Kemalisme, tetapi berada ditengah-tengahnya. Turki juga menjelma menjadi negara yang lebih demokratis dari sebelumnya. Dalam hal ini terjadinya transisi demokrasi di negara Turki dimana hak sipil mulai terlihat terang dan mendapat kebebasan dalam bergerak serta menjaga budaya Turki yang sempat hilang.

Ketika AKP memperoleh dukungan besar dalam pemilu dan membentuk pemerintahan, konstelasi politik Turki berubah drastis. Pada periode pertama pemerintahannya (2002-2007), AKP bertahan ditengah ihtiar-ihtiar semua lawan politik yang berupaya menjatuhkannya. Nuansa politik ideologis begitu kental pada fase ini yang kemudian berpuncak pada pemilu 2007 yang dimenangkan lagi oleh AKP. Kemudian pada fase kedua pemerintahan, AKP lebih banyak melakukan konsolidasi sehingga mampu memenangkan kembali pemilu pada tahun 2011.

Dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Erdogan, Pencapaian yang sangat terlihat saat PM Erdogan berkuasa adalah dalam sektor ekonomi. Tingkat ekonomi Turki naik secara pesat. Pada tahun 2001, sebelum AKP berkuasa, ekonomi Turki menempati urutan 26 dunia dengan GDP tahunan sebesar 230 juta USD. Setelah AKP berkuasa, terhitung sejak 2002 hingga 2010, ekonomi Turki naik ke uruta 16 dunia dengan GDP naik tiga kali lipat dari

sebelumnya yakni menjadi 780 juta USD.⁶Pendapatan per kapita pun juga mengalami kenaikan yang signifikan.Sebelum AKP berkuasa, pendapatan per kapita AKP sebesar 3.500 USD, kemudian dibawah kepemimpinan AKP, per tahun 2010 sebesar 10.000 USD.Dalam sektor export juga mengalami kenaikan drastis yang sebelum tahun 2002 sebesar 36 juta USD, kemudian setelah AKP berkuasa menjadi 114 juta USD per tahun 2010.Peningkatan ekonomi inilah yang mmebuat AKP selalu mendapat keprcayaan rakyat Turki dan terus memenangkan pemilu.⁷

Pada tahun 2013, pemerintah berhasil membuat Produk Domestik Nasional Turki mencapai 100 Milyar Dollar. Selain itu Turki masuk dalam anggota G-20 yakni negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia,padahal sebelumnya Turki ada pada urutan 111 dunia namun kemudian berhasil masuk ke urutan 16 sebagai negara dengan ekonomi terbesar dunia,DI tahun yang sama pula pendapatan Perkapita Turki berhasil naik dari 3500 dolar pertahun menjadi sebesar 11.000. Erdogan juga berhasil membuat nilai tukar mata uang Turki naik beberapa kali lipat dimasa pemerintahannya.Angka pengangguran berhasil ditekan hingga 2 persen saja dari 35% yang diimbangi dengan kenaikan gaji hampir 300 persen untuk upah pegawai. Utang Negara Turki sendiri terhadap IMF berhasil diselesaikan dan cadangan devisa juga ditingkatkan hingga 100 Milyar Dollar.

AKP adalah partai yang sangat menjunjung tinggi demokrasi.Walaupun partai ini berhaluan Islam, namun tetap juga mengakomodasi kepentingan kelompok lain.Seperti pada

⁶ <http://www.akparti.org.tr/english/icraat/8976/turkey-becomes-16th-largest-economy> diakses pada 10 Februari 2018

⁷ <http://www.akparti.org.tr/english/icraat/8966/exports-more-than-tripled> diakses pada

10 Februari 2018

masalah Kurdistan, Syiah, tuntutan umat Kristen, serta membersihkan sisa rezim militer untuk kesetaraan hak militer dan sipil. Dalam masalah Kurdistan, Perdana Menteri Erdogan mengambil langkah dialog. Identitas Kurdistan menjadi diakui sebagai salah satu bagian dari bangsa Turki. Dalam persoalan Syiah, pemerintah menerima tuntutan kelompok ini yang menginginkan tempat ibadah khusus. Begitu juga dengan tuntutan umat Kristen, pemerintah mengakui kepengurusan Patrick Romawi Ortodoks di Istanbul, dan membuka kembali sekolah kependetaan di kepulauan Haibly, daerah dekat Istanbul. Pemerintah melakukan tindakan ini demi terwujudnya Turki yang memiliki keberagaman dan syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sedangkan dalam masalah dominasi militer dalam politik, pemerintah menetralkan posisi militer, sehingga militer tidak bisa campur tangan dalam masalah pemerintah secara berlebihan. Maka terwujudnya hubungan militer dan sipil di Turki yang cukup seimbang dan dapat dikontrol.

Dalam pemerintahan Erdogan, terdapat beberapa kali referendum di Turki. Mulai dari referendum tentang persidangan atau kedudukan militer di Turki, masalah pemilihan suara yang bersifat mengikat, masalah kurdi, hingga masalah penggunaan jilbab yang menjadi kontroversial oleh kelompok sekuler. Namun dari referendum-referendum yang diajukan pemerintahan AKP tersebut mendapat dukungan hampir 50 % lebih rakyat Turki. Namun hal ini justru merupakan suatu ancaman dari kelompok sekuler yang mengganggu AKP memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politiknya, ditambah dengan pernyataan pemerintah bahwa Kurdi merupakan bagian dari bangsa Turki. Dengan adanya referendum yang melahirkan konstitusi ini mendapat apresiasi dari Uni Eropa yang menilai adanya gerakan demokratisasi di Turki. Sehingga ini meningkatkan *bergaining position* Turki di Eropa.⁸

⁸ Syarif Taghian, Op.Cit Hal.229

Sebelum AKP berkuasa, kelompok militer selalu menguasai pemerintahan. Siapapun yang berkuasa di negara Turki pasti berada dibawah bayang-bayang militer, sehingga banyak kudeta atas pemerintah yang dianggap tidak mendukung kelompok militer dan sekuler. Dalam hubungan AKP dan militer, banyak pengamat politik Turki mengatakan telah terjadinya demokratisasi oleh AKP, Perdana Menteri Erdogan membuktikan keberhasilan AKP dalam kontrol sipil terhadap militer.⁹ Di bawah kepemimpinan Erdogan, dapat dikatakan kekuatan militer setara dengan kekuatan sipil, artinya hak sipil mulai terlihat terang dan mendapat kebebasan yang lebih, terutama untuk menjaga budaya Turki yang sempat dilarang. Sebenarnya sudah ada percobaan perlawanan dari militer, namun dapat dinetralkan oleh pemerintah dengan mengangkat isu keanggotaan Turki di Uni Eropa. AKP berhasil memberikan keseimbangan antara peran militer dan sipil, sehingga militer tidak terlalu ikut campur dalam pemerintahan.

Selain itu AKP juga menjalin kerjasama lembaga atau organisasi kewirausahaan yakni Independent Industrialist and Businessmen Assosiation (MUSIAD), sebagai tempat berkumpulnya pemilik modal, pelaku industri dan penisnis Turki. Karena para pemodal atau pengusaha adalah merupakan bagian penting di Turki bagi militer. Pemerintahan AKP dapat bertahan dan terus memenangkan pemilu dari 2002 hingga 2014 dan tetap bisa berjalan dengan militer tanpa mengalami kudeta. Kericuhan yang sempat terjadi pada 2007 dan 2012 dapat diatasi AKP. Dalam hal ini militer merespon secara damai dan cenderung non-nterventif terhadap perubahan-perubahan penting pada periode transisi demokrasi yang terjadi di Turki, terhitung sejak AKP menguasai Turki dan

⁹Tiara Sarah, Demokratisasi Turki : Hubungan Sipil-Militer, UI Press, Jakarta, 2012, halaman 218

kekuatan politik sipil mendominasi parlemen dan tampil di pemerintahan. Kehadiran AKP tak diperkirakan sebelumnya, mengingat kudeta 1997 kekuatan politik islamis dibatasi ruang geraknya oleh militer.¹⁰

Selain berkurangnya peran militer dalam mengatur jalannya politik dan pemerintahan di Turki, kebebasan pers juga dibuka. Media-media baru juga mulai bermunculan setelah gerakan militer dibatasi. Salah satu yang menarik adalah pendekatan pemerintah kepada pers. Saat militer sangat dominan dalam politik, pemerintah dan pers tidak bisa berdampingan dengan baik, bahkan media sangat kurang dalam pemberitaan pemerintah. Dalam pemerintahan Perdana Menteri Erdogan, pemberitaan tentang pemerintah mulai bermunculan. Baik berita yang pro ataupun kontra dengan pemerintah.

Salah satu kebijakan pemerintah yang menimbulkan kontroversi adalah mencabut larangan jilbab. Pencabutan larangan jilbab memang sudah menjadi janji politik AKP saat pemilu 2002. Kebijakan ini bagi AKP adalah bagian dari berlangsungnya demokrasi di Turki dimana setiap warga berhak menjalankan keyakinannya dan wajib dilindungi oleh pemerintah. Pada tahun 2013, larangan jilbab sudah benar-benar direalisasikan dalam undang-undang Turki, walaupun sebenarnya pada tahun 2008 sudah sempat diterapkan namun terdapat gangguan dan perdebatan antara kubu pro dan kontra yakni kelompok sekuler.¹¹

Dalam bidang keamanan, pemerintah mengembangkan pertahanan nasional melalui persenjataan yang tidak bergantung dengan negara lain atau produksi sendiri. Untuk

¹⁰ M Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, PT PENJURU ILMU SEJATI, Bekasi, 2015, hal 187

¹¹ <http://www.voaindonesia.com/read/world-world/2013/10/09/27116/turki-cabut-undangundang-larangan-jilbab/#sthash.cOkXyiK3.dpbs> diakses pada 10 Februari 2018

mewujudkan keamanan, AKP melakukan dua pendekatan dasar yaitu dengan mengadakan dialog dan perjanjian kepada negara-negara sekitar Turki terutama negara rawan konflik di Timur Tengah. Kemudian juga meningkatkan peran Dewan Keamanan Nasional dengan tujuan menjadi penyelaras antara militer dan para pembuat kebijakan di Turki.

Dalam hal memberantas korupsi, pemerintah menjalankan beberapa kebijakan seperti kebijakan transparansi dalam pelayanan publik. Selain itu menjalankan lembaga atau kantor yang bergerak dalam bidang pemberantasan atau pengaduan korupsi di Turki. AKP juga membentuk NGO-NGO untuk mengontrol korupsi, karena militer atau polisi dikhawatirkan akan menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi dan kepentingan politik. AKP juga menganggap peran jaksa harus lebih tinggi dari militer, serta mengontrol audit keuangan negara dengan baik, dengan mengikut sertakan pihak atau kantor anti korupsi.

Dalam bidang pendidikan, pemerintahan AKP sangat memperhatikan pendidikan dan penelitian. Pemerintah membuat kebijakan untuk menggratiskan biaya pendidikan dimana semua biaya kuliah untuk masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah juga membuat program beasiswa dalam jumlah yang besar untuk masyarakat Turki dan pelajar dari luar negara Turki untuk melakukan riset. Riset atau penelitian ilmiah sangat ditingkatkan demi tujuan menjadi negara nomor satu pada tahun 2023. Salah satu negara yang kuat menjalin kerjasama adalah Jerman.¹² Selain itu pusat study dan beberapa lembaga penelitian diberikan kesempatan untuk berkreasi dan diberikan dana oleh pemerintah baik itu dari lembaga Islam, Kristen, Kurdi, begitu juga yang lainnya. Erdogan juga membuat kebijakan mengembalikan pengajaran Al Quran dan Hadits di sekolah-sekolah negeri di

¹²<http://www.akparti.org.tr/english/haberler/8966/turkeys-minister-of-science-and-tech-in-berlin-to-open-german-turkish-year/58285> diakses pada 10 Februari 2018

Turki yang sudah lama dilarang, selain itu diberlakukannya kebebasan berhijab di kampus-kampus Turki.

Dalam politik luar negerinya, Turki melalui menteri luar negerinya Ahmed Davutoglu berupaya menjadikan Turki negara yang kuat secara ekonomi dan sebagai percontohan demokrasi di Timur Tengah. Politik luar negeri Turki menggunakan konsep *Strategic Depth*, karya dari Davutoglu yang dipublikasikan pertama pada 2001. Konsep ini adalah pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak atas pemahaman sejarah dan posisi geostrategis Turki.¹³ AKP meyakini dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, maka akan terbentuk lingkungan internasional yang aman, menciptakan pembangunan ekonomi yang baik dan kerjasama yang baik. Dalam praktek politik luar negerinya, Pemerintah banyak membangun dialog dan memberikan bantuan pemikiran kepada negara tetangga, serta menjaga stabilitas regional di sekitar negara.

Pemerintah juga memiliki program utama politik luar negeri yakni bergabung dalam Uni Eropa. AKP melihat hubungan keterkaitan antara Turki dan Eropa sudah terjalin sejak awal Republik Turki didirikan. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan NATO, Amerika Serikat, Rusia, dan China dalam hal peningkatan keamanan dan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah kerjasama antara negara-negara mayoritas muslim di dunia, serta meningkatkan peran Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Dalam hal ini terlihat dengan diamanahkannya sekretaris jenderal OKI dari negara Turki pada tahun 2005 yaitu Ekmeleddin Ihsanoglu.

Selama 3 periode menjabat sebagai Perdana Menteri, sejak terjangnya kebijakan Erdogan di dalam dan luar negerinya membuat namanya semakin populer sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia. Keberhasilan Perdana Menteri

¹³ Ahmad Dzakhirin, *Op.cit* Hal.46

Erdogan dalam memegang tampuk kekuasaan Turki telah membuat Turki menjadi semakin baik dan kuat. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa Erdogan sebagai pemimpin Islam paling berpengaruh di dunia dan membuat Turki sangat dikagumi dunia dengan kehebatannya. Erdogan juga mendapat simpati dari rakyat Turki, meskipun tidak sedikit kritikan dan hambatan dari pihak yang kontra yakni kelompok sekuler. Maka tidak heran dengan kepopuleran Erdogan dan AKP inilah ia kemudian percaya diri untuk mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2014 dan berhasil terpilih sebagai presiden.

C. Erdogan Sebagai Presiden

1. Kemenangan Erdogan Dalam Pemilu

Ketika masa jabatannya sebagai Perdana Menteri selesai pada tanggal 28 Agustus 2014, Erdoğan dengan kepopulerannya di mata rakyat Turki kemudian mencoba mencalonkan diri sebagai Presiden Turki melalui partainya, Partai AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi). Hasilnya pada tanggal 10 Agustus 2014 Erdogan berhasil terpilih sebagai Presiden Turki melalui pemilihan umum menggantikan presiden sebelumnya dengan masa jabatan selama lima tahun. Ia terpilih sebagai presiden dalam pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting dalam dinamika demokrasi Politik Turki mengingat dalam 91 tahun sejarah negara tersebut, presiden selalu dipilih oleh parlemen. Sebuah pesta demokrasi terbesar yang pernah terjadi di Turki.

Tiga kandidat yang bersaing memperebutkan posisi tersebut yakni Recep Tayyip Erdogan, akademisi dan mantan ketua OKI Ekmeleddin İhsanoğlu, dan politisi muda dari suku Kurdi Selahattin Demirtaş. Erdogan mengatakan jika dia menang, ia ingin mengubah jabatan seremonial presiden menjadi sumber kekuatan eksekutif negara. Slogan kampanye

Erdogan adalah "kehendak rakyat, kekuatan rakyat." Ia menyatakan apapun hasil pemilu, Turki tidak akan lagi sama. Erdogan berhasil mengalahkan dengan mudah kedua pesaingnya dengan mendapatkan dukungan sekitar 52 %.

Erdogan merayakan kemenangan bersama ribuan pendukungnya di Ankara. Ia tampil di balkon kantor pusat partai yang membesarkan namanya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), tempat ini selalu dijadikan tempat untuk pidatonya setiap kali partai AKP memenangkan pemilu. Erdogan menyampaikan pidato politik tentang Turki yang baru. Saat itu euforia kemenangan begitu terasa, kemeriahan kembang api meramaikan langit Ankara, berpadu dengan ramainya pendukung yang bergembira atas kemenangan Erdogan.

Erdogan berjanji akan menyatukan negara dengan jabatan kepresidenannya. Dalam pidato kemenangannya ia mengatakan, "Hari ini kita menutup sebuah era dan memulai langkah pertama untuk era baru," dari balkon tersebut, Minggu malam. Dia menegaskan janjinya akan proses baru rekonsiliasi sosial, dengan menempatkan seluruh warga Turki apapun keyakinan dan latar belakangnya setara sebagai warga negara. Ia menambahkan, "Saya berterima kasih kepada setiap warga negara, baik yang memilih saya maupun tidak, yang telah berkontribusi menulis sejarah di hari bersejarah ini,". "Hari ini adalah hari baru. Hari ini adalah pijakan. Hari ini adalah hari sebuah 'Turki baru' yang akan bangkit dari keterpurukan", tutup Erdogan yang disambut gemuruh suara pendukungnya.¹⁴

¹⁴<https://internasional.kompas.com/read/2014/08/11/06301221/Ini.Pidato.Politik.Perta.ma.Erdogan.sebagai.Presiden.Terpilih.Turki>. diakses pada 11 Februari 2018

Kemenangan Erdogan ini bukanlah suatu kejutan. Secara umum kita harus mencatat, sejak AKP menguasai Turki, prestasi ekonomi negara ini sangat melejit. Salah satu hipotesis mengapa Erdogan berhasil menangkan perebutan suara rakyat Turki adalah karena banyak orang yang melihat prestasi dalam sektor ekonomi. Kaum menengah mapan terlihat enggan dan ragu untuk mencoba-coba akan hadirnya pemimpin baru yang belum tentu seefektif Erdogan dan jaringan pemerintahan AKP. Memang pada faktanya Turki belumlah diterima sebagai anggota Uni Eropa, sesuatu yang sudah diinginkan sejak lama. Namun krisis dan kebangkrutan yang terjadi pada beberapa negara Eropa, justru memberikan hikmah untuk Turki, bahwa negara ini ternyata sudah lebih maju dibandingkan negara-negara tersebut dan lebih tahan terhadap krisis.

2. Transformasi Kebijakan Erdogan Menjadi Otoriter

Dibawah kekuasaan presiden Erdogan, demokrasi yang berjalan justru seolah-olah “menghilang”. Erdogan menjelma menjadi pemimpin yang anti kritik. Lebih dari sepuluh tahun AKP dipercaya oleh rakyat *Turki* sebagai partai besar, dan tiga kali berturut-turut *Erdogan* mendapat dukungan penuh tanpa cacat hingga terpilih menjadi presiden. Namun kemudian terjadi keresahan oleh masyarakat Turki yang menganggap kekuasaan Erdogan justru merugikan dan berusaha mengikat rakyat dengan peraturan-peraturan yang dinilai sangat otoriter. Kebebasan pers pun juga menghilang. Wajah demokratis Turki yang dibangun bertahun-tahun oleh Erdogan justru berubah menjadi otoritarian ditangan Erdogan sendiri.

Semua pihak yang mengkritik pemerintah berhadapan dengan hukum. Seperti yang dialami oleh mantan Ratu Kecantikan Turki Merve Buyuksarac, dilansir oleh Hurriyet Daily News, Jumat (27/3/2015) ia diajukan ke pengadilan karena dianggap menghina Erdogan. Jaksa penuntut

mengancam menerapkan dakwaan maksimal yakni penjara dua tahun. Awal permasalahannya adalah pada tahun 2014 ia membagikan gambar di Instagram dengan mengutip sebaity puisi dari majalah satir Uykuzuz. Secara tak langsung menyindir Presiden Erdogan suka memanfaatkan negara untuk kepentingan kelompoknya.¹⁵

Dalam puisi tersebut, nama Erdogan diganti 'Buyuk Usta' alias sang raja diraja. Sebenarnya saat puisi itu tersebar ke jejaring sosial, Erdogan masih sebagai Perdana Menteri Turki. Namun, setelah Erdogan menjadi presiden, tim pengacara Erdogan melaporkan Buyuksarac ke polisi pada November 2014. Presiden Erdogan juga semakin rajin menangkap tokoh oposisi, baik dari kalangan politikus, akademisi, hingga orang biasa. Namun kasus yang menimpa Buyuksarac tersebut menjadi perhatian publik, karena kaum selebritis pun juga diberangus oleh rezim Erdogan. Tercatat sampai pada tahun 2015, Presiden Erdogan dilaporkan telah mengerahkan tim pengacara menuntut 67 orang dengan pasal 'penghinaan'.

Selain itu pemerintahan Erdogan juga mengambil alih media-media yang dinilai vocal terhadap Erdogan. Salah satu media terpopuler di Turki yakni "Zaman" secara mengejutkan diambil alih pemerintah karena sering mengkritik Presiden Erdogan. Kantor redaksi "Zaman" diserbu oleh Polisi atas perintah pengadilan. Pengadilan Kota Istanbul menyatakan media massa yang sering mengkritik Presiden Erdogan tersebut harus diambil alih manajemen oleh pemerintah. Seperti yang dilaporkan oleh BBC, pada Sabtu (5/4/2016), ratusan orang berkumpul di halaman kantor 'Zaman' untuk menghalangi tindakan polisi. Akibatnya, aparat menembakkan gas air mata, menyemprotkan meriam air, serta mendorong mundur para demonstran.

¹⁵ <http://www.hurriyetdailynews.com/defamation-suits-arrests-of-journalists-threaten-turkeys-democracy-ipi-80247> diakses pada 12 Februari 2018

Media “Zaman” adalah salah satu surat kabar dengan penjualan tertinggi di Turki. Namun Presiden Erdogan tidak suka dengan berita-berita di dalamnya, karena dinilai banyak memuat kepentingan Gerakan Hizmet yang dipimpin Fethullah Gulen. Namun terkait keputusan pengambil alihan manajemen media Zaman, pengadilan menolak untuk memberi komentar apa alasannya. Pemerintah Turki menyatakan Gerakan Hizmet sebagai kelompok teroris yang akan mengacaukan Turki. Hal ini merespon Uni Eropa yang mengancam apa yang dilakukan rezim Erdogan karena dianggap tidak menghormati kebebasan pers.

Menurut Organisasi Jurnalis Tanpa Batas, Turki berada pada urutan 149 dari 180 negara tentang kebebasan pers. Tercatat sudah ada lebih dari 30 wartawan telah dipenjara (sampai berita ini dibuat), rata-rata mereka yang masuk bui adalah wartawan beretnis Kurdi. Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdogan menegaskan, sebanyak 1.845 kasus penghinaan presiden Erdogan telah diajukan ke pengadilan yang mencakup jurnalis, selebriti, bahkan juga anak SMA. Semuanya berurusan dengan meja hijau hanya karena mengkritik pemerintahan Presiden Erdogan. Seorang tokoh oposisi yang namanya minta dirahasiakan, menilai Erdogan menjadi semakin otoriter dan tidak mau disalahkan, semua kritik yang obyektif tapi bernada keras dianggap sebagai penghinaan kepada Erdogan.¹⁶

Setelah hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Erdogan, terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh beberapa anggota militer terhadap pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan, yakni pada Jumat, 15 Juli 2016 dimana kendaraan dan pasukan militer menyerbu Ibu Kota Turki, Ankara dan Istanbul. Perdana menteri Yildirim mengumumkan di stasiun televisi bahwa kejadian itu adalah upaya kudeta oleh

¹⁶ <http://www.dw.com/id/-jurnalis-yang-kritis-terhadap-erdogan-diadili-dengan-uu-anti-teror/a-39814262> diakses pada 12 Februari 2018

kelompok militer dan pemberontak. Namun saat itu, Presiden Erdogan sedang berlibur di lokasi yang jauh dari Ankara dan Istanbul.

Erdogan menyatakan bahwa kudeta merupakan gerakan Gulenist. Sebuah gerakan keagamaan dan politik yang berpengaruh yang ingin disejajarkan dengan Erdogan di bawah pimpinan ulama Islam, Fethullah Gulen sebagai musuh politik Erdogan. Erdogan lalu mendorong masyarakat turun ke jalan sebagai upaya protes. Di Ankara, demonstran mengikuti perintah Erdogan untuk turun ke jalan mendukung pemerintahan. Juru bicara intelijen nasional Turki mengumumkan bahwa kudeta telah ditolak. Erdogan akhirnya kembali ke Istanbul sebagai pertanda bahwa kudeta gagal. Namun pemimpin gerakan Gulenist, Fethullah Gulen membantah terlibat dalam kudeta.

Dengan adanya kudeta ini kemudian Presiden Erdogan memberlakukan masa darurat selama tiga bulan dan melakukan operasi besar-besaran kepada pendukung Gulen dengan menangkap dan menahan warganya yang dituding sebagai kelompok Gulenist. Tercatat ada 6.000 tentara ditahan, 99 jenderal didakwa, dan 2.700 hakim dan jaksa ditahan yang diduga terlibat dalam upaya kudeta. Pemerintah juga membidik media yang diduga kuat berafiliasi dengan kelompok Fethullah Gulen. Sedikitnya 131 koran, stasiun televisi dan kebijakan kebijakan lain yang dinilai represif. Kemudian Pada tanggal 29 September 2016, secara mengejutkan Presiden Erdogan memperpanjang masa darurat sampai satu tahun. Untuk tahap pertama, Erdogan akan memperpanjangnya selama tiga bulan, setelah itu dilanjutkan dengan tiga bulan lainnya sampai setahun. Banyak anggota parlemen Turki dan politisi lainnya tak setuju dengan perpanjangan masa darurat tersebut. Namun, Erdogan mengabaikan protes dan kecaman dari para pengkritiknya itu.

Peristiwa kudeta berdarah ini mengakibatkan terjadinya guncangan politik di lingkungan eksekutif dan legislatif, karena banyak juga pejabat pemerintah yang ditangkap karena dianggap memiliki hubungan dengan Gülen, perubahan politik ini justru menguntungkan Erdogan karena memunculkan kubu yang kuat bagi politik Erdogan. Selain itu terdapat juga guncangan di bidang kehakiman dan tentu saja militer sebagai aktor kudeta, banyak hakim dan tentara ditangkap karena diyakini berafiliasi dengan jaringan Gülen. Melemahnya kanal politik yang demokratis akan mengalihkan proses dan konflik politik pada politik kekerasan yang sulit dihentikan.

Kurang dari satu tahun setelah peristiwa kudeta, tepatnya pada hari Minggu 16 April 2017, Erdogan memenangkan referendum yang digelar untuk mengubah sistem parlementer Turki menjadi presidensial sekaligus memberikan wewenang yang lebih besar untuk presiden dan menguatkan peran eksekutif. Erdogan menyatakan ada 25 juta orang yang mendukung amandemen konstitusi, atau 51,5 persen pemilih, terpaut tipis dari kubu yang berseberangan. Terdapat 160 ribu lebih tempat pemungutan suara di seantero Turki yang dipenuhi ribuan pemilih. Erdogan pun juga tidak ketinggalan untuk menjatuhkan suaranya bersama istri dan anak-anaknya di sebuah TPS di Ankara, ibu kota Turki.¹⁷

Sejak terjadinya upaya kudeta militer kepada pemerintah yang berakhir gagal pada Juli 2016, partai Pembangunan dan Kesejahteraan (AKP) dan juga dukungan partai koalisi, berupaya untuk meloloskan konstitusi baru. Adapun dalam konstitusi baru tersebut terdapat 18 paket, yang nantinya akan memberikan kekuasaan absolut kepada presiden. Kekuasaan tersebut antara lain, menentukan kabinet tanpa perlu persetujuan parlemen, hak menyusun anggaran negara,

¹⁷<http://www.liputan6.com/global/read/2922539/erdogan-menang-referendum-turki-beralih-ke-sistem-presidensial> diakses pada 12 Februari 2018

mengerahkan tentara hingga mengumumkan keadaan darurat. Kekuasaan ini juga menghapus jabatan perdana menteri yang sudah ada dalam pemerintahan Turki sejak kudeta militer pada 1978.

Upaya AKP dan koalisi untuk meloloskan amandemen konstitusi baru ini mendapatkan pertentangan keras dari partai oposisi. Mereka khawatir aturan baru yang diamandemen akan merubah negara Turki menuju sistem otoritarian. Kekhawatiran itu bukan tanpa sebab, mengingat setelah upaya kudeta militer yang gagal pada Juli 2016, pemerintah bertindak secara represif dimana ratusan ribu warga Turki yang beraal dari pegawai negeri sipil, dosen, jurnalis, sampai mahasiswa ditangkap karena diduga terlibat dalam rencana menurunkan kekuasaan Erdogan.

Referendum ini tak bisa dipungkiri merupakan perkembangan politik paling penting di negeri itu sejak Republik Turki berdiri pada 1923. Amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan sangat besar bagi presiden atau eksekutif dan menafikkan peran parlemen dalam sistem presidensial yang baru. Amandemen baru setidaknya akan diimplementasikan pada 2019 dalam pemilihan presiden. Dalam amandemen juga terdapat perpanjangan kekuasaan presiden menjadi 5 tahun, dan boleh menjabat 2 periode, maka dalam hal ini Erdogan bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dan 2024. Artinya, dia bisa terus berkuasa hingga 2029 dan sekaligus menjadi pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dia dirikan. Selama ini, peran presiden dalam sistem kenegaraan Turki sebagian besar sekadar seremonial. Dengan adanya amandemen konstitusi ini maka peran kepala negara, yakni kekuasaan Presiden dalam politik Turki menjadi nyaris tanpa batas dan semakin *powerfull*.